



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

Pedoman Penyusunan DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) Tahun 2023



ONE
Data
Information
Technology

Kata Pengantar

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya hak kewajiban bagi seluruh warga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan.

Salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Agar data dan informasi mengenai lingkungan hidup dapat tersedia dan terakses, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutan Daerah (SILHKD) dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

DIKPLHD dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen DIKPLHD ini dari provinsi dan kabupaten/kota ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model D-P- S-I-R (Driving Force-Pressure-State-Impact-Response).

DIKPLHD ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai semangat Reformasi Birokrasi. Sebagai penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang telah menyusun DIKPLHD serta leadership kepala daerah dalam pengelolaan LHK secara baik, setiap tahunnya Presiden Republik Indonesia memberikan apresiasi.

Agar kualitas data dan informasi lingkungan hidup dapat meningkat dari waktu ke waktu (continuous improvement), maka melalui Pedoman Penyusunan DIKPLHD ini dapat menjadi acuan sah bagi seluruh pihak dalam penyusunan DIKPLHD. Terima Kasih.

Jakarta, 18 April 2023
Sekretaris Jenderal,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM
NIP 19640930 198903 1 001

I. TATA CARA PENYUSUNAN

a. Tim Penyusun dan Bentuk Dokumen

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Tim Penyusun dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan laporan status lingkungan hidup daerah sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009. DIKPLHD ini terdiri atas 2 (dua) buku, yaitu :

- (1) Buku I, adalah buku yang menyajikan Ringkasan Eksekutif dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Ringkasan Eksekutif maksimal terdiri atas 30 halaman dengan menyampaikan pendalaman Analisa permasalahan yang diangkat dalam Buku II (6 Matra Isu Lingkungan Hidup Daerah);
- (2) Buku II, adalah buku yang berisikan laporan utama informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Laporan utama ini disajikan dengan melakukan hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (*Driving Force, Pressure State, Impact and Response Analysis/ DPSIR*).

b. Kelengkapan administrasi

Untuk kelengkapan administrasi dokumen harus melampirkan sebagai berikut : 1. Kata Pengantar yang harus ditanda tangani oleh Kepala Daerah, 2. Penyaringan isu prioritas yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan tinggi, Organisasi Perangkat Daerah (Stakeholders) yang dikukuhkan oleh SK Tim Penyusunan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, 3. Biodata Penyusun, 4. Surat Pernyataan yang menyatakan keabsahan data yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan diketahui oleh kepala daerah. 5. Surat Pernyataan dari Kepala Daerah mengenai inovasi, 6. Buku I (Ringkasan Eksekutif) dan Buku II (Laporan Utama).

c. Penetapan Isu Prioritas dan Inovasi Kepala Daerah

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Isu prioritas minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima). Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan permangku kepentingan di daerah. Proses penetapan isu prioritas wajib menggunakan pendekatan DPSIR, sedangkan, inovasi kepala daerah meliputi kegiatan teknis yang sudah ada hasilnya di lapangan atau berupa kebijakan/regulasi baru, yang dijalankan atau dibuat pada periode waktu penilaian dan disampaikan dalam bentuk pernyataan tertulis kepala daerah yang dapat diperkuat dengan gambar visual ataupun dokumen yang dilampirkan.

d. Waktu Penyampaian Dokumen dan Penyebarluasan Informasi

DIKPLHD yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi wajib *diupload* pada website masing-masing daerah dan disampaikan dalam bentuk *softfile* dengan format file *pdf* melalui surat elektronik ke alamat : nirwasitantra@menlhk.go.id Format saji dokumen dalam bentuk PDF. Masing-masing daerah wajib mengisi tabel data melalui aplikasi SILHKD. OPD Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota menyampaikan DIKPLHD kepada OPD Bidang Lingkungan Hidup Provinsi guna memperoleh rekomendasi, sedangkan OPD Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi menyampaikan DIKPLHD kepada Pusat Pengendalian Pembangunan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion (P3E) guna memperoleh rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan (P3E) dan OPD bidang Lingkungan Hidup Provinsi didasarkan kepada kriteria yang tertuang pada Sub Bab Tatacara Penilaian. DIKPLHD berikut rekomendasi dari OPD Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota dan Provinsi dapat disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal KLHK atau secara elektronik melalui alamat: nirwasitantra@menlhk.go.id paling lambat tanggal **31 Juli 2023** pukul **23.59 WIB**.

II. TATA CARA PENULISAN

a. Tata cara Umum

Tata cara umum terdiri atas format baku penulisan dan sistematika penyajian dokumen. Format baku penulisan adalah sebagai berikut:

1. Pengetikan

a). Batas dan Ukuran Kertas

Batas kiri — Batas kanan — Batas atas — Batas bawah : 4 cm — 3 cm — 3 cm — 3 cm dari tepi kertas. Ukuran kertas A4.

b). Huruf dan Spasi

Huruf menggunakan jenis huruf Tahoma 12 poin (ukuran sebenarnya) dan diketik rapi (rata kiri kanan – justify) dengan spasi 1,5.

2. Penomoran Halaman

Jenis nomor halaman ada dua macam, yaitu angka romawi kecil dan angka latin. Angka romawi digunakan dalam penomoran Bab. Khusus halaman judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan.

3. Sampul/Cover

Sampul/Cover dengan warna hijau muda (tanpa gambar) yang memuat Judul **DOKUMEN INFORMASI KINERJA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN** (dengan ukuran huruf 14/16 dan **hanya** dilengkapi dengan logo daerah dan KLHK).

4. Penomoran Tabel Utama dan Tabel Tambahan

Penomoran tabel utama disesuaikan dengan daftar tabel yang telah diberikan, sedangkan tabel tambahan yang merupakan penunjang tabel utama (jika diperlukan) maka menambahkan huruf kecil setelah nomor tabel utama (contoh. Tabel 11. A)

Setiap Tabel harus dilengkapi dengan:

	Judul Tabel		diisi sesuai format yang tertulis
	Provinsi/Kabupaten/Kota		diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota penyusun laporan
	Tahun Data		diisi dengan tahun data yang digunakan
	Keterangan		diisi dengan penjelasan tanda-tanda baca seperti (-), (NA), (td), (0) atau penjelasan tentang keberadaan komponen/ sub komponen yang diminta dalam tabel.
	Sumber		diisi dengan sumber perolehan data

b. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian DIKPLHD terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri atas :

- 1) Sampul memuat Judul dan Nama Instansi penyusun.

- 2) Pernyataan memuat pernyataan bahwa isu prioritas Daerah dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. Pernyataan ditandatangani oleh Kepala Daerah.
 - 3) Kata Pengantar, uraian singkat penyusunan dokumen termasuk proses penyusunannya. Kata Pengantar ditandatangani oleh Kepala Daerah.
 - 4) Daftar Isi
 - 5) Daftar Tabel
 - 6) Daftar Gambar
 - 7) Daftar Lampiran
2. Bagian Utama

Bagian utama, terdiri atas .

- 1) Bab I Pendahuluan. Pendahuluan memuat mengenai: (a) latar belakang; (b) profil atau keadaan umum daerah termasuk kekhususan kondisi ekologisnya; (c) gambaran singkat proses penyusunan dan perumusan isu prioritas termasuk proses penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dalam sub bab ini dijelaskan pula proses perumusan dan pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas daerah; (d) maksud dan tujuan; dan (e) ruang lingkup penulisan.
- 2) Bab II. Pada Bab II ini mengkategorikan Analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact*, dan *Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah ke dalam :
 1. Tata guna lahan. Tata guna lahan berikut tutupan lahannya. Untuk daerah yang berada di wilayah pesisir dan laut, wajib memasukan rencana pengelolaan pesisir dan laut. Data yang dituangkan dalam sub bab ini adalah yang berkaitan dengan tataguna lahan berikut perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Terhadap daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, wajib menuangkan data yang berkaitan dengan rencana tata ruang dan pemanfaatan pesisir dan laut. Data tidak hanya berbentuk angka (nominal), tetapi juga dengan prosentase (misalnya luas hutan lindung = 20.000 ha atau x % dari luas wilayah administrasi daerah ybs). Dilengkapi juga data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinannya). Data berbentuk spasial (peta) wajib digunakan untuk mendukung. Analisis *driving force, pressure, state, impact*, dan *response* wajib didukung dengan data berkala (time series). Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Sebagai contoh pengurangan atau penurunan hutan lindung, faktor *driving force*-nya (pemicu), *pressure*-nya dijelaskan dan didukung dengan data berkala (time series), demikian juga jelaskan bagaimana *impact* yang terjadi dan *response* telah dilakukan oleh daerah dengan didukung oleh data. Visualisasi data dalam bentuk Grafik dan Peta hendaknya jelas dan dilengkapi dengan legenda yang mudah terbaca. Data yang dapat digunakan untuk mendukung analisis DPSIR pada sub bab ini, antara lain Tabel 1 s/d Tabel 17. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.
 2. Kualitas air. Data yang disajikan meliputi kualitas air sungai, air tanah, dan air laut (kualitas air laut khusus bagi daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut). Contoh analisis air sungai tercemar industri tekstil, yang menjadi *driving force*-nya adalah

banyaknya industri tekstil yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, *pressure* adalah masih kurangnya industri yang memiliki IPAL, *response*-nya mendorong peneakan industri agar membangun IPAL melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data yang diperlukan untuk menunjang analisis DPSIR antara lain kualitas air sungai, danau, air tanah, dan air laut (khusus daerah yang berada di pesisir dan laut). Data kualitas dan kuantitas air DAS, jumlah penduduk yang tergantung dengan DAS, jumlah industri dan non industri pencemar (sumber pencemar) serta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air tanah, pipanisasi dan layanan air bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, transportasi laut dan sungai, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung untuk analisis ini adalah Tabel 22 s/d Tabel 30. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.

3. Kualitas udara. Data yang dituangkan meliputi status mutu udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), konsumsi BBM, bahan pencemar. Contoh :kondisi udara ambien yang tercemar oleh logam berat, penyebabnya (*pressure*) adalah kondisi penggunaan BBM, kondisi kendaraan bermotor termasuk penjualannya, kondisi jalan, dan kondisi industri pencemar. Pemicu (*driving force*) bisa karena jumlah kendaraan bermotor yang banyak. Response dalam bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut, tentunya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program. Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung minimal yang dapat digunakan untuk analisis adalah Tabel 36 s/ d Tabel 40. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.
4. Resiko bencana. Bencana yang dimaksudkan bisa berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, banjir, longsor), bencana non alam (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit), dan bencana sosial (seperti konflik sosial). Driving Force diungkapkan dalam bentuk data yang terkait persoalan yang memicu terjadi bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (land use), penyempitan badan sungai, kondisi drainase atau data lainnya yang menunjang. Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Informasi peta rawan lingkungan mutlak diperlukan untuk analisis pada sub bab ini. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung yang dapat digunakan adalah Tabel 44. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.
5. Perkotaan. Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya semakin sulit dikontrol sehingga seringkali menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan (fasilitas, sistem dan area). Kemunduran lingkungan perkotaan telah terjadi di berbagai daerah, yang indikasinya dapat dilihat dari aspek fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan sampah) dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman). Data aspek fisik dan aspek sosial ekonomi yang merupakan kondisi eksis yang mutlak dituangkan dalam analisis, selanjutnya dijelaskan *pressure* dalam perkotaan yang didukung dengan data, dan *response*-nya adalah berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan untuk mengatasi persoalan

lingkungan perkotaan tersebut. Salah satu permasalahan perkotaan adalah sampah, yang meliputi sampah domestik (sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga), dan sampah spesifik. Data yang dituangkan berupa sumber sampah, produksi sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data yang dituangkan dalam *pressure* adalah penyebab terjadinya persoalan sampah. *Response* adalah upaya yang dilakukan dari mulai pengurangan dan penanganan sampah, yang berbentuk peraturan atau program daerah. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah Tabel 31, 35 dan Tabel 46 s/d Tabel 48. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan dalam tabel tambahan.

6. Tata Kelola. Data seperti perijinan dan evaluasinya, peraturan yang telah diterbitkan, Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pendapatan Asli Daerah merupakan kondisi eksisting atau *driving force* (pendorong/pemicu) yang ditampilkan di dalam data. *Pressure* seperti pengaduan masyarakat yang timbul dalam pengelolaan LH, sedangkan jumlah personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup dan jumlah staf fungsional yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup bisa merupakan kondisi eksisting atau *state*. Kegiatan atau program yang diinisiasi oleh masyarakat dan pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan merupakan *response* dari *pressure* yang timbul. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah Tabel 18 s/d Tabel 21, Tabel 41 s/d Tabel 43, Tabel 50 s/d Tabel 60. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.
- 3) Bab III. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah. Isu prioritas yang diambil adalah berdasarkan data-data yang sebelumnya telah jelaskan pada Bab II, masalah utama yang dihadapi, serta tren IKLH dalam 5 tahun terakhir. Dengan demikian, isu yang diprioritaskan menggambarkan atau mempunyai hubungan yang kuat dengan masalah yang akan dipecahkan yang dapat pula tercermin dalam tren IKLH. Isu prioritas ini dapat mengenai *pressure* (berbagai penyebab terjadinya masalah, dapat berupa aspek-aspek sosial, ekonomi, birokrasi, kelembagaan maupun politik), *state* (kondisi atau potret LH pada saat periode penilaian), atau *response* (kebijakan, program maupun kegiatan yang berhubungan dengan jenis *pressure* yang ditetapkan untuk memperbaiki kondisi *state*). Isu prioritas paling banyak 5 (lima) dan paling sedikit 3 (tiga). Dalam merumuskan isu prioritas, deskripsi kondisi terutama keunikan daerah harus diungkap dan menjadi bahan pertimbangan. Topik yang dapat dijadikan isu prioritas adalah: (1) Pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup ataupun *pressure* sebagai penyebab-penyebabnya, dan/atau persoalan tatakelola untuk menjalankan respon yang dilakukan; dan (2) Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (*urgent*). Muatan yang dituangkan dalam Bab Isu Prioritas adalah yang berkaitan dengan proses perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas.
- 4) Bab IV. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab ini memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup pada periode penilaian. Kriteria kegiatan atau inisiatif yang dapat dijadikan inovasi daerah yaitu: (1) Berupa kebijakan dan/atau kegiatan. Kebijakan dapat berbentuk dokumen, sedangkan kegiatan sudah berjalan dan ada hasilnya di lapangan; (2) Kebijakan dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan hanya yang masuk ke dalam periode waktu penilaian, namun

dapat juga diulas trens perubahan/perkembangannya seandainya sudah dilakukan pada tahun sebelumnya; (3) Kepala Daerah memberi penjelasan secara tertulis apa alasan inovasi tersebut dijalankan, hambatan yang dihadapi dan faktor penentu keberhasilan menjalankannya. Inisiatif atau kegiatan sebagai inovasi tersebut dapat berupa upaya peningkatan peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD), peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik) serta inisiatif atau kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat (bila ada). Data yang mendukung dituangkan se jelas mungkin, sebagai contoh besaran APBD bidang lingkungan hidup termasuk persentasenya dibandingkan keseluruhan APBD. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan. Tabel 61 adalah inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya

- 5) Bab V. Penutup. Bab ini memuat intisari (simpulan) dari Bab II s/ d Bab IV, dan rencana tindak lanjutnya termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan kepala daerah.
- 6) Daftar Pustaka. Semua pustaka yang diacu wajib dituangkan dalam daftar pustaka. Pustaka yang diacu harus relevan dengan pokok bahasan. Pustaka dapat berupa publikasi atau laporan dari dinas/lembaga kredible ataupun publikasi penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas.
- 7) Lampiran. Keseluruhan data utama dan data tambahan wajib dicantumkan dalam lampiran sesuai dengan tata cara yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir penulisan berupa lampiran-lampiran yang relevan dengan penulisan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, seperti perhitungan data, peta, foto, keputusan kepala daerah yang terkait penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, dan daftar riwayat hidup tim penyusun. Jenis data minimal yang harus ada dalam penyajian informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah adalah sebagaimana tercantum dalam aplikasi SILHKD atau website www.menlhk.go.id

III. TATA CARA PENILAIAN

a. Tata Kelola Dokumen

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah berikut rekomendasi penilaian paling lambat tanggal 31 Juli 2023 Pukul 23.59 WIB, disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk *Softfile* dengan format file *pdf*.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dinilai oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Tahapan Penilaian

1. Tingkat Provinsi dan Ekoregion

- Tingkat propinsi memberikan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kepatuhan bagi DIKPLHD yang dikirimkan oleh kota dan kabupaten.
- Tingkat Ekoregion memberikan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kepatuhan bagi DIKPLHD yang dikirimkan oleh Propinsi.

2. Tingkat Kementerian LHK

Penilaian dilakukan melalui tahapan sbb: (1) tahapan penapisan, yaitu penilaian atas buku ringkasan eksekutif, kelengkapan dan kemutakhiran data (isi tabel data dan tahun data), sumber data, kelengkapan administrasi dan kepatuhan; serta (2) tahapan penilaian atas : (a). analisis hubungan kausalitas antara isu prioritas dengan data yang disajikan dengan menggunakan pendekatan DPSIR, (b) Inovasi daerah yang *genuine* (asli) dan berdampak luas bagi kelestarian lingkungan (3) tahapan wawancara Kepala Daerah dan DPRD (menyesuaikan dengan keadaan) dan /atau *Vlog* Presentasi Kepala Daerah dan DPRD dengan durasi 10 menit (Kepala Daerah 7 menit dan DPRD 3 menit), khusus wawancara DPRD mengenai fungsinya dalam mendukung pengembangan program Lingkungan Hidup. Untuk menentukan pemenang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya terbebas dari **tindak pidana korupsi**.

Hasil penilaian diumumkan menyesuaikan dengan keadaan melalui website <http://www.menlhk.go.id>. Penghargaan Nirwasita Tantra akan diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan apresiasi kepada daerah yang menyusun dan menyampaikan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup tepat pada waktunya.

Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya
Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Tahun Data :

(1)	(2)	(3)	(4)	Luas Kawasan (5)	Tutupan Lahan			
					Vegetasi (6)	Area Terbangun (7)	Tanah Terbuka (8)	Badan Air (9)
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung						
		2. Kawasan Bergambut						
		3. Kawasan Resapan Air						
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai						
		2. Sempadan Sungai						
		3. Kawasan Sekitar Danau						
		4. Ruang Terbuka Hijau						
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam						
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya						
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut						
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut						
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau						
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut						
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut						
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan						
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor						
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang						
		3. Kawasan Rawan Banjir						
	Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil					
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam					
			iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi					
		Kawasan Rawan Bencana	i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi					
			ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi					
			iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah					
			iv. Kawasan yang terletak di Zona Patahan Aktif					
			v. Kawasan Rawan Tsunami					
vi. Kawasan Rawan Abrasi								
vii. Kawasan Rawan Gas Beracun								
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air	i. Kawasan Imbunan Air Tanah							
	ii. Sempadan Mata Air							
Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfir							
	2. Ramsar							
	3. Taman Buru							
	4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutraf							
	5. Kawasan Pengungsian Satwa							
	6. Terumbu Karang							
	7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi							
Kawasan Budaya								

Keterangan : *Diisi dengan berdasarkan SK versi terbaru (SK RTRW)*

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

(1) - (4) Nama Kawasan

(5) Diisi dengan luas kawasan dalam satuan hektar (ha)

(6) Diisi dengan tutupan lahan vegetasi dalam satuan hektar (ha)

(7) Diisi dengan tutupan lahan area terbangun dalam satuan hektar (ha)

(8) Diisi dengan tutupan lahan tanah terbuka dalam satuan hektar (ha)

(9) Diisi dengan tutupan badan air dalam satuan hektar (ha)

Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

Sumber:

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst

(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan.

(3) Diisi dengan luas lahan non pertanian yang merupakan lahan terbuka dan pemukiman dalam satuan hektar

(4) Diisi dengan luas lahan sawah yang merupakan pertanian lahan basah dalam satuan hektar

(5) Diisi dengan luas lahan kering yang merupakan kebun campuran, semak/belukar, tegalan/lading dalam satuan hektar

(6) Diisi dengan luas lahan perkebunan yang merupakan kebun dengan satu jenis tanaman atau komoditi tertentu kecuali kebun campuran

(7) Diisi dengan luas hutan dalam satuan hektar

(8) Diisi dengan luas badan air yang terdiri dari air, tambak/empang dan danau dalam satuan hektar

Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun :

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi hutan		
1	Hutan Produksi	
2	Hutan Lindung	
3	Taman Nasional	
4	Taman Wisata Alam	
5	Taman Baru	
6	Cagar Alam	
7	Suaka Margasatwa	
8	Taman Hutan Raya	
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	
3	Hutan Adat	
4	Hutan Kota	
5	Taman Hutan Raya	
6	Taman Keanekaragaman Hayati	

Keterangan :

Sesuai dengan PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Luas kawasan hutan menurut fungsi dan status sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dituangkan dalam RTRW atau Perda,

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- ✓ (1) Diisi dengan angka 1,2,3,...
- ✓ (2) Cukup jelas
- ✓ (3) Diisi menggunakan angka dalam satuan hektar

Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun Data :

Golongan.	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Mamalia	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
	dst.	dst.				
2. Aves	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
	dst.	dst.				
3. Reptil	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
	dst.	dst.				
4. Amphibi	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
	dst.	dst.				
5. Pisces	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
8. Flora yang Dilindungi	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
	dst.	dst.				

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1). Diisi dengan Nama Golongan flora dan fauna yang ada
- (2). Diisi dengan nama latin spesies flora dan fauna
- (3). Diisi dengan nama lokal spesies flora dan fauna
- (4)-(7). Diisi dengan **Ya** atau **Tidak**

Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Nama Perusahaan/Perorangan	SK	Jenis Satwa Yang Ditangkarkan
(1)	(2)	(3)	(4)

Keterangan:

Sesuai dengan PERMEN Kehutanan Nomor 69 tahun 2013 tentang Perubahan atas PERMEN Kehutanan Nomor : P.19/MENHUT-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel:

- (1). Diisi dengan Nama perusahaan yang mendapat ijin penangkaran
- (2). Diisi dengan Nomor SK dan tanggal berlakunya ijin penangkaran
- (3). Diisi dengan Surat Keputusan penangkaran satwa maupun tumbuhan liar yang masih berlaku
- (4). Diisi dengan Jenis Satwa atau tumbuhan yang ditangkap

Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Kabupaten/ Kota/ Kecamatan	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Keterangan :

Sesuai dengan UU 37 tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air

Sesuai dengan peraturan dirjen nomor P.3/PDASHL/SET/KUM.1/7/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3,dst
- (2) Diisi dengan kabupaten/kota/kecamatan yang ada di provinsi/kabupaten/kota penyusun laporan
- (3) Diisi dengan luas lahan kritis dalam kawasan hutan dalam satuan hektar
- (4) Diisi dengan luas lahan kritis luar kawasan hutan dalam satuan hektar
- (5) Diisi dengan luas lahan sangat kritis dalam kawasan hutan dalam satuan hektar
- (6) Diisi dengan luas lahan berpotensi kritis dalam kawasan hutan dalam satuan hektar
- (7) Diisi dengan luas lahan berpotensi kritis luar kawasan hutan dalam satuan hektar
- (8) Diisi dengan luas lahan agak kritis dalam kawasan hutan dalam satuan hektar
- (9) Diisi dengan luas lahan agak kritis luar kawasan hutan dalam satuan hektar
- (10) Diisi dengan luas lahan tidak kritis dalam kawasan hutan dalam satuan hektar
- (11) Diisi dengan luas lahan tidak kritis luar kawasan hutan dalam satuan hektar

Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Lokasi	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		< 20 cm	0,2 - 1,3		
2		20 - < 50 cm	1,3 - < 4		
3		50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0		
4		100 - 150	9,0 - 12		
5		> 150 cm	> 12		

Keterangan :

Diisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 200 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor Urut
- (2) Cukup Jelas
- (3) Cukup Jelas
- (4) Diisi dengan angka dalam satuan (mm/10 tahun)
- (5) Diisi dengan kata "**Melebihi**" atau "**Tidak**"

Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Ketebalan Solum	< 20 cm		
2		Kebatuan Permukaan	> 40%		
3.A		Komposisi Fraksi	< 18% koloid;		
3.B		Komposisi Fraksi	> 80% pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³		
5		Porositas Total	< 30% ; > 70%		
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0		
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5		
8		Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm		
9		Redoks	< 200 mV		
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		

Keterangan:

Diisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah

Sumber:

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Diisi angka hasil pengamatan dengan satuan masing-masing parameter
- (5) Diisi dengan kata "**Melebihi**" atau "**Tidak**"

Tabel-9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3m		
2		Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH \leq 2,5		
3		Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 Cm		

Keterangan:

Diisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Diisi menggunakan angka dalam satuan masing-masing
- (6) Diisi dengan kata "Melebihi" atau "Tidak"

Tabel-10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
 Provinsi/Kabupaten/Kota :
 Tahun Data :

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				

Keterangan :

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan nama lokasi hutan mangrove
- (3) Diisi dengan luasan tutupan mangrove dalam satuan hektar
- (4) Diisi dengan persentase tutupan mangrove
- (5) Diisi dengan kerapatan tutupan mangrove dalam satuan pohon per hektar

Tabel-11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5	dst.		

Keterangan:

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan provinsi/kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan angka luas padang lamun dalam satuan hektar
- (4) Diisi dengan presentase area kerusakan

Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						

Keterangan :

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi luasan tutupan terumbu karang menggunakan satuan hektar
- (4) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sangat baik
- (5) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi baik
- (6) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sedang
- (7) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi rusak

Tabel-13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permukiman		
2	Industri		
3	Tanah kering		
4	Perkebunan		
5	Semak belukar		
6	Tanah kosong		
7	Perairan/kolam		
8	Lainnya (sebutkan)		

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Cukup jelas
- (3) Diisi dengan luas lahan sebelum perubahan dalam satuan hektar
- (4) Diisi dengan luas lahan sesudah perubahan dalam satuan hektar

Tabel-14. Jenis Pemanfaatan Lahan

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tambang		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
			Mikro		
2	Perkebunan		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
			Mikro		
3	Pertanian		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
			Mikro		
4	Pemanfaatan Lahan		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
			Mikro		
dst					

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

- (1) Diisi dengan nomor urut angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan jenis pemanfaatan lahan yang ada di wilayah administrasi daerah yang bersangkutan
- (3) Diisi dengan jumlah pemanfaatan lahan
- (4) Diisi dengan besarnya skala usaha dari jenis pemanfaatan lahan (Besar/Menengah/Kecil/Rakyat)
- (5) Diisi dengan luas lahan pemanfaatan lahan masing-masing skala usaha dengan satuan ha
- (6) Diisi apabila ada penjelasan pada masing-masing jenis pemanfaatan lahan

Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No.	Lokasi	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel

- (1) Diisi dengan nomor urut angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan lokasi Areal Izin Usaha
- (3) Diisi dengan jenis bahan galian
- (4) Diisi dengan luas ijin usaha penambangan dalam satuan hektar
- (5) Diisi dengan luas area produksi dalam satuan hektar
- (6) Diisi dengan produksi dalam satuan ton per tahun

Tabel-16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota :
 Tahun Data :

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Lokasi Penanaman	Penghijauan				Reboisasi		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
Dst.									

Keterangan :

Definisi Penghijauan

Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan (PP No. 76 Tahun 2008)

Definisi Reboisasi

Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan (PP No.76 Tahun 2008)

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota/kecamatan yang ada di provinsi penyusun laporan
- (2) Diisi dengan lokasi penanaman
- (4) Diisi dengan target penghijauan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam satuan hektar
- (5) Diisi dengan luas realisasi penghijauan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam satuan hektar
- (6) Diisi dengan jumlah realisasi pohon dilokasi dalam satuan batang
- (7) diisi dengan jumlah pohon yang hidup dilokasi dalam satuan batang
- (8) Diisi dengan target reboisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam satuan hektar
- (9) Diisi dengan luas realisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam satuan hektar
- (10) Diisi dengan realisasi jumlah pohon yang ditanam oleh instansi pemerintah daerah pada kegiatan reboisasi dalam satuan batang

Tabel-17. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman Maksimal (m)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2106

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan nama lokasi kerusakan gambut
- (3) Diisi dengan kabupaten/kota/kecamatan yang ada diprovinsi/kabupaten/kota penyusunan laporan
- (4) Diisi dengan luas kerusakan gambut dalam satuan hektar
- (5) Diisi dengan kedalaman maksimal gambut dalam satuan meter
- (6) Diisi dengan prosentasi kerusakan gambut
- (7) Diisi dengan penyebab kerusakan gambut

Tabel-18. Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
 Provinsi/Kabupaten/Kota :
 Tahun Data:

No	Provinsi/Kab/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan :

Sesuai dengan PERMEN LHK Nomor 20 Tahun 2022

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan lokasi Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
- (4) Diisi dengan jumlah produksi sesuai dengan SK Definitif
- (5) Diisi dengan luas sesuai dengan Surat Ketetapan Definitif

Tabel-19. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan :

Sesuai dengan PERMEN LHK Nomor 77 Tahun 2019

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

(1) No urut diisi dengan angka 1,2,3, dst

(2) Apabila provinsi maka data yang diminta adalah jumlah dan luas izin di Kabupaten

(3) Apabila Kab/Kota maka data yang diminta adalah jumlah dan luas izin di Kecamatan

(4) Cukup Jelas

(5) Cukup Jelas

Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No.	Nama Spesies	Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status menurut CITES
(1)	(2)	(3)	(4)

Keterangan :

Sesuai PERMEN Kehutanan Nomor 104 Tahun 2013

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel:

(1) No urut diisi dengan angka 1,2,3, dst

(2) Diisi dengan spesies TSL yang diperdagangkan

(3) Diisi dengan bagian-bagian yang diperdagangkan misal : kulit, kuku, utuh (mati/hidup)

(4) Diisi dengan Status menurut CITES: Appendix 1, 2, atau 3

Tabel-21. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
 Provinsi/Kabupaten/Kota :
 Tahun Data :

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA						
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan PERMEN LHK Nomor 3 Tahun 2021
 Sumber :

- Penjelasan Isi Tabel:
- (1) No urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
 - (2) Diisi lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
 - (3) Diisi nama perusahaan dengan IUPJLWA
 - (4) Diisi luas pemanfaatan Jasa Aliran Air dilokasi dalam bentuk hektar
 - (5) Diisi luas wisata alam dilokasi dalam bentuk hektar
 - (6) Diisi luas perlindungan keanekaragaman hayati dalam bentuk hektar
 - (7) Diisi luas penyelamatan dna perlindungan lingkungan dalam bentuk hektar
 - (8) Diisi luas penyerapan karbon dalam bentuk hektar
 - (9) Diisi Surat Keputusan IUPJLWA sesuai lokasi

Tabel 22. Kualitas Air Sumur

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No	Lokasi Sumur/Titik Pantau	Waktu Sampling (tg/bh/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO ₃ sebagai N (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (M) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Klorida (mg/l)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	Belereng sebagai H ₂ S (mg/L)	Fecal coliform (jml/100 ml)	Total coliform (jml/100 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)				
			Lintang	Bujur																																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)				

Keterangan :

Sesuai PERMEN Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Isi dengan nomor urut angka 1,2,3,...

(2) Isi dengan lokasi sumur atau titik pantauan yang masuk dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan

(3) Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling (tg/bh/thn)

(4) Diisi titik koordinat lintang pengambilan sampel air sungai

(5) Diisi titik koordinat bujur pengambilan sampel air sungai

(6)-(42) Isi dengan angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-23. Kualitas Air Laut
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun Data :

No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tg/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Wama (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (Oc)	pH	Salinitas (‰)	DO (mg/l)	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO2-N (mg/l)	NO3-N (mg/l)	PO4-P (mg/l)	Sianida (CN-) (mg/l)	Sulfida (H2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
			Lintang	Bujur																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

Keterangan :
Sesuai dengan PERMEN LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH
Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :
(1) Diisi dengan angka urut 1,2,3,dst.
(2) Diisi dengan nama lokasi pemantauan (Pelabuhan, wisata bahari,)
(3) Diisi dengan tanggal pemantauan di masing-masing titik sampling (tg/bln/thn)
(4)-(5) Diisi dengan titik koordinat pengambilan sampel kualitas air laut
(6)-(30) Cukup Jelas. Untuk data berupa angka dapat diisi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-24. Curah Hujan Rata-rata Bulanan

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No.	Nama dan Lokasi Stasiun	Titik Koordinat		Bulan											
		Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Keterangan :

Sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3,dst
- (2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun pengamatan
- (4) - (5) Diisi dengan titik koordinat pengambilan sampel curah hujan rata-rata bulanan
- (5) - (16) Diisi dengan menggunakan angka dalam satuan milimeter (mm)

Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Kabupaten/Kota	Mata Air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan (Liter)	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

Keterangan :

Definisi air ledeng : sumber air yang berasal dari air yang telah melalui prosor penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air.

Definisi air sumur : air yang berasal dari tanah yang digali dan lingkaran tersebut dilindungi tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter kebawah tanah serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur

Definisi air kemasan berdasarkan SNI : air yang telah diproses dan disajikan dalam kemasan plastik atau kaca, serta aman diminum

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Diisi dengan nomor urut 1,2,3,dst
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/ kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan ledeng sebagai sumber air minum
- (4) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumur sebagai sumber air minum
- (5) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air sungai sebagai sumber air minum.
- (6) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air hujan sebagai sumber air minum.
- (7) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum.
- (8) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber selain kolom (3)-(9) sebagai sumber air minum dalam satuan liter

Tabel-26. Kualitas Air Hujan
 Provinsi/Kabupaten/Kota :
 Tahun Data :

Lokasi Pemantauan	Titik Koordinat		Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO ₄	NO ₃	Cr	NH ₄	Na	Ca ²⁺	Mg ²⁺
	Latitude	Longitude										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jan									
			Feb									
			Mar									
			Apr									
			Mei									
			Jun									
			Jul									
			Ags									
			Sep									
			Okt									
			Nop									
			Des									

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Cukup Jelas. Diisi dengan lokasi pemantauan kualitas air hujan

(2)-(3) Diisi dengan titik koordinat lokasi pengambilan sampel kualitas air hujan

Tabel-27. Kondisi Sungai
 Provinsi/Kabupaten/Kota :
 Tahun Data :

No.	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama sungai
- (3) Diisi dengan lokasi sungai
- (4) Diisi dengan menggunakan angka panjang sungai dalam satuan kilometer (km)
- (5) Diisi dengan menggunakan angka lebar permukaan sungai dalam satuan meter (m)
 Lebar sungai dan kedalaman sungai dihitung rata-ratanya
- (6) Diisi dengan menggunakan angka lebar dasar sungai dalam satuan meter (m)
- (7) Diisi dengan menggunakan angka kedalaman sungai dalam satuan meter (m)
- (8) Diisi dengan menggunakan angka debit maksimal air sungai dalam satuan meter kubik per detik (m³/detik)
- (9) Diisi dengan menggunakan angka debit minimal air sungai dalam satuan meter kubik per detik (m³/detik)

Tabel-28. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Diisi dengan nama danau/waduk/situ/embung
- (2) Diisi menggunakan angka luas danau/situ/waduk/embung dalam satuan hektar
- (3) Diisi dengan lokasi danau/situ/waduk/embung
- (4) Diisi menggunakan angka volume air danau/situ/waduk/embung dalam satuan meter kubik

Tabel-29. Kualitas Air Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun Data:

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform	Total coliform	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)			
				Lintang	Bujur																								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)			
1			a.																										
			b.																										
			c.																										
			d.																										
			e.																										
			f.																										
			g.																										
			h.																										
2																													

Keterangan :

Data Kualitas air sungai provinsi minimal menggunakan data dari dana dekonstruksi pemantauan kualitas air sungai.

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel:

(1) Diisi dengan nomor urut angka 1, 2, 3, dst

(2) Diisi dengan nama sungai yang masuk dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan

(3) Diisi dengan lokasi pengambilan sampel kualitas air sungai

(4) Diisi dengan nama lokasi titik pantau

(5)-(6) Diisi dengan titik koordinat pengambilan sampel air sungai.

(6) Diisi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling (tgl/bln/thn)

(7)-(27) Diisi dengan angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
 Provinsi/Kabupaten/Kota :
 Tahun Data :

No.	Nama	Lokasi	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (ug/L)	Minyak dan Lemak (ug/L)	Detergen (ug/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh / 100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
				Lintang	Bujur																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

Keterangan :
 Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Diisi dengan nomor urut angka 1,2,3,...
- (2) Diisi dengan nama danau yang masuk dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan
- (3) Diisi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling (tgl/bln/thn)
- (4) Diisi dengan waktu pengambilan sampel kualitas air Danau/Waduk/Situ/Embung
- (5)-(6) Diisi titik koordinat pengambilan sampel air Danau/Waduk/Situ/Embung.
- (7)-(28) Isi dengan angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3 , dst

(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun dokumen atau diisi dengan kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun dokumen

(3) Diisi dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di Kabupaten/Kota/Kecamatan.

(4) Diisi dengan jumlah rumah tangga (KK) dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri.

(5) Diisi dengan jumlah rumah tangga (KK) dengan fasilitas tempat buang air besar bersama.

(definisi bersama adalah jamban/kakus yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu)

(6) Diisi dengan jumlah rumah tangga (KK) dengan fasilitas tempat buang air besar umum.

(definisi umum adalah jamban/kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya)

(7) Diisi dengan jumlah rumah tangga (KK) dengan tempat buang air besar di sungai, kolam, kebun, laut.

Tabel-32. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No	Kabupaten/Kota/Kec.	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Keterangan :

L = Laki-Laki

P = Perempuan

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Cukup jelas

(2) Diisi dengan nama kabupaten/kotayang ada diprovinsi penyusun laporan

(3)-(10) Diisi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam satuan jiwa

Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)	(4)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3 , dst
- (2) Diisi dengan lokasi penduduk yang sakit
- (3) Diisi dengan jenis penyakit yang ada di provinsi penyusun laporan
- (4) Diisi dengan jumlah penderita penyakit dalam satuan jiwa

Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Presentase Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan:

Sumber :

Penjelasan Isi tabel :

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3 , dst

(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan

(3) Diisi dengan jumlah rumah tangga di masing-masing kabupaten/kota/kecamatan

(4) Diisi dengan jumlah rumah tangga miskin di masing-masing kabupaten/kota/kecamatan

(5) Diisi dengan prosentase rumah tangga miskin di masing-masing kabupaten/kota/kecamatan

Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	a. Bergerak :							
	1.							
	2.							
	dst.							
	b. Tidak Bergerak :							
	1.							
	2.							
	dst.							

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

(1) Diisi dengan nomor urut angka 1,2,3, dst

(2) Sumber pencemar diisi dengan a). Bergerak : diisi dengan Transportasi darat, laut dan udara, contohnya tempat sarana transportasi darat antara lain ; terminal bus Pulogadung, stasiun kereta api Solo Balapan dll. b). Tidak bergerak : diisi dengan aktivitas seperti industri, rumah sakit, hotel, tempat wisata, dst.

(3) Diisi dengan Lokasi sampel limbah

(4) Diisi dengan Jenis atau klasifikasi sumber pencemar. Contoh : Terminal, Pelabuhan, Tempat Wisata, Hotel, Rumah Sakit, Pabrik, dst

(4) Diisi dengan luas areal sumber pencemaran

(5) Diisi dengan perkiraan volume limbah padat

(6) Diisi dengan perkiraan volume limbah cair

(7) Diisi dengan perkiraan volume limbah B3 padat

(8) Diisi dengan perkiraan volume limbah B3 cair

Tabel-36. Suhu Udara Rata-rata Bulanan

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Lokasi	Titik Koordinat		Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
			Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Diisi dengan nomor urut angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun pengamatan
- (3) Diisi dengan lokasi pemantauan
- (4)-(5) Diisi dengan titik koordinat pemantauan
- (6)-(17) Diisi menggunakan angka dalam satuan derajat celcius

Tabel-37. Kualitas Udara Ambien

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO(µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)	PM10 (µg/Nm ³)	PM2,5 (µg/Nm ³)	TSP (µg/Nm ³)	Pb (µg/Nm ³)	Dustfall (µg/Nm ³)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm ³)	Fluor Index (µg/Nm ³)	Klorine dan Klorine Dioksida (µg/Nm ³)	Sulphat Index (µg/Nm ³)
	Latitude	Longitude															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Diisi dengan nama lokasi pemantauan
- (2) Diisi dengan titik koordinat pemantauan
- (3) Diisi dengan angka lama pengukuran pengukuran (1jam, 24 jam, 1 tahun) disesuaikan dengan daerah
- (2)-(18) Diisi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-38. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri :											
1.	Industri Kecil											
2.	Industri Sedang											
3.	Industri Besar											
B	Rumah Tangga :											

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst

(2) Diisi sesuai dengan klasifikasi penggunaan

(3)–(13) Diisi sesuai dengan jumlah konsumsi bahan bahan bakar yang digunakan.

Tabel-39. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang digunakan Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sepeda Motor				
2	Mobil Penumpang				
3	Mobil Bus				
4	Mobil Barang				
5	Kendaraan Khusus				

Keterangan :

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel:

(1)-(2) Cukup Jelas

(3) Diisi dengan jumlah unit kendaraan

(4)–(6) Diisi dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di wilayah administrasi daerah yang bersangkutan dengan satuan unit sesuai dengan

Tabel-40. Perubahan Penambahan Ruas Jalan

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No	Kelas Jalan	Panjang Jalan dua tahun terakhir (km)	
		tahun	tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jalan Bebas Hambatan		
2	Jalan Raya		
3	Jalan Sedang		
4	Jalan Kecil		
5	Jalan Nasional		
6	Jalan Provinsi		

Keterangan :

Sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 31 ayat 3 menyatakan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

(1)-(2) Cukup Jelas

(3)-(4) Diisi dengan panjang jalan dua tahun terakhir dalam bentuk kilometer

Tabel-41. Dokumen Izin Lingkungan

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan:

Tabel ini merupakan hasil penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012

Definisi AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan

Definisi UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang tidak

Sumber:

Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst

(2) Diisi dengan tahun dokumen izin lingkungan diterbitkan

(3) Diisi dengan jenis dokumen izin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))

(4) Diisi dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan

(5) Diisi dengan komisi penilai saat dokumen izin lingkungan diterbitkan

(6) Diisi dengan nama pemrakarsa

(7) Diisi dengan nama dokumen

Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/ Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Nomor urut

(2) Diisi dengan tahun perusahaan mendapatkan izin mengelola limbah B3

(3) Diisi dengan nama perusahaan yang mendapat izin mengelola limbah B3

(4) Diisi dengan jenis kegiatan/usaha sesuai dengan lampiran

(5) Diisi dengan jenis izin : penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, atau pengangkutan

(6) Diisi dengan nomor SK yang berlaku pada tahun penyusunan laporan

(7) Diisi dengan nama dokumen

Tabel-43. Pengawasan Izin Lingkungan(AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan :

Tabel ini merupakan hasil penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. Izin lingkungan terdiri dari AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama perusahaan/pemrakarsa izin lingkungan
- (3) Diisi dengan tanggal/bulan/tahun pelaksanaan pengawasan
- (4) Diisi dengan hasil pengawasan izin lingkungan

Tabel-44. Kebencanaan
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun Data:

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban	
					Mengungsi	Meninggal
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama kecamatan yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan lokasi bencana
- (4) Jenis Bencana a) Tanah Longsor; b) Gempa Bumi; c) Kekeringan; d) Kebakaran Hutan dan Lahan
- (5) Diisi dengan total area terkena bencana dalam satuan hektar
- (4) Diisi dengan jumlah korban yang mengungsi dalam satuan orang
- (5) Diisi dengan jumlah korban yang meninggal dalam satuan orang
- (6) Diisi dengan perkiraan kerugian yang terjadi akibat bencana alam dalam satuan rupiah

Tabel-45. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk (Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut
- (2) Diisi dengan kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan.
- (3) Diisi dengan luas kabupaten/kota
- (4) Diisi dengan jumlah penduduk .
- (5) Diisi dengan presentase pertumbuhan penduduk
- (6) Diisi dengan presentase kepadatan penduduk

Tabel-46. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No.	Propinsi/Kota/Kab	Lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (M ³)	Volume Eksisting (M ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan provinsi/kota/kabupaten tempat pembuangan akhir sampah
- (3) Apabila Propinsi maka TPA yang diisi adalah TPA kab/kota
- (3) Apabila Kab/Kota maka TPA yang diisi adalah TPA kecamatan
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Cukup jelas
- (7) Cukup jelas

Tabel-47. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Lokasi	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (M ³ /hari)	Status Pengelolaan Sampah		
					Open Dumping	Sanitary Landfill	Controlled Landfill
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan lokasi timbunan sampah
- (4) Diisi dengan jumlah penduduk yang ada di kabupaten/kota
- (5) Diisi dengan perkiraan timbulan sampah dalam satuan kilogram per hari
- (6,7,8) Sudah jelas (beri tanda ceklist (√) jika memiliki, beri tanda string (-) jika tidak memiliki)

Tabel-48. Jumlah Bank Sampah

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Cukup Jelas
- (2) Diisi dengan lokasi bank sampah
- (3) Diisi dengan tahun terbentuk bank sampah
- (4) Diisi dengan nama bank sampah
- (5) Diisi dengan dasar hukum pendirian bank sampah
- (6) Diisi dengan jumlah sampah yang diterima setiap bulan
- (7) Diisi dengan status bank sampah (aktif atau tidak aktif)
- (8) Diisi dengan wilayah pelayanan bank sampah
- (9) Diisi dengan jumlah penabung aktif
- (10) Diisi dengan jumlah karyawan yang bertugas
- (11) Diisi dengan omset dari bank sampah dalam rupiah

Tabel-49. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst.

(2) Diisi dengan nama kegiatan fisik lingkungan contoh : pembuatan kompos, pembersihan saluran air/selokan.

(3) Diisi dengan lokasi kegiatan fisik lingkungan

(4) Diisi dengan pelaksana kegiatan fisik lingkungan (oleh pemerintah, masyarakat, swasta)

Tabel-50. Status Pengaduan Masyarakat

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst,
- (2) Diisi dengan pihak yang mengadukan (perseorangan, kelompok, lembaga swasta, instansi pemerintah)
- (3) Diisi dengan masalah lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat
- (4) Diisi dengan tahun pengaduan
- (5) Diisi dengan status dan tindak lanjut pengaduan

Tabel-51. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Nama LSM	Lokasi	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama LSM lingkungan hidup
- (3) Diisi lokasi LSM Lingkungan hidup
- (4) Diisi dengan akta pendirian LSM lingkungan hidup
- (5) Diisi dengan alamat LSM lingkungan hidup

Tabel-52. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Tingkat Pendidikan	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Doktor (S3)			
2.	Master (S2)			
3.	Sarjana (S1)			
4.	Diploma (D3/D4)			
5.	SLTA			
	Jumlah			

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Cukup jelas
- (3) Diisi dengan jumlah personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup dengan jenis kelamin laki-laki
- (4) Diisi dengan jumlah personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup dengan jenis kelamin perempuan
- (5) Diisi dengan jumlah keseluruhan kolom (3) dan (4)

Tabel-53. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data:

No	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst

(2) Diisi dengan nama instansi asal

(3) cukup jelas, pilihan PEDAL atau PPLH

(4) Diisi dengan jumlah staf fungsional laki-laki

(5) Diisi dengan jumlah staf fungsional perempuan

(6) Diisi dengan jumlah staf laki-laki yang sudah mengikuti diklat

(7) Diisi dengan jumlah staf perempuan yang sudah mengikuti diklat

Diisi dengan nama jabatan fungsional berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tabel-54. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama orang/kelompok/organisasi penerima penghargaan lingkungan hidup
- (3) Diisi dengan nama penghargaan lingkungan hidup contoh : Adipura, Kalpataru, dll
- (4) Diisi dengan instansi pemberi penghargaan lingkungan hidup (pemerintah/swasta)
- (5) Diisi dengan tahun penerimaan penghargaan lingkungan hidup

Tabel-55. Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan:

Sumber:

Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst

(2) Diisi dengan nama kegiatan sosialisasi lingkungan hidup. Contoh : penyuluhan, kampanye, iklan layanan masyarakat, talkshow.

(3) Diisi dengan instansi penyelenggara kegiatan sosialisasi lingkungan hidup

(4) Diisi dengan kelompok sasaran kegiatan sosialisasi lingkungan hidup

(5) Diisi dengan bulan dan tahun kegiatan penyuluhan

Tabel-56. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya	Satu Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)
	PERTANIAN		
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
1	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2	Pertambangan dan Penggalian		
3	Industri Pengolahan		
4	Listrik, Gas dan Air Bersih		
5	Bangunan		
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran		
7	Pengangkutan dan Komunikasi		
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan		
9	Jasa-Jasa		
PRODUK DOMESTIK BRUTO			
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS			

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

(1) dan (2) Cukup Jelas

(3)-(4) Diisi dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sektor/sub sektor pada masing-masing daerah yang bersangkutan sesuai publikasi Badan Pusat Statistik selama dua tahun

Tabel-57. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No. (1)	URAIAN (2)	Dua Tahun Sebelumnya (3)	Satu Tahun Sebelumnya (4)
	PERTANIAN		
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2	Pertambangan dan Penggalian		
3	Industri Pengolahan		
4	Listrik, Gas dan Air Bersih		
5	Bangunan		
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran		
7	Pengangkutan dan Komunikasi		
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan		
9	Jasa-Jasa		
	PRODUK DOMESTIK BRUTO		
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

(1) dan (2) Cukup Jelas

(3)-(4) Diisi dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sektor/Sub Sektor pada masing-masing daerah yang bersangkutan sesuai publikasi Badan Pusat Statistik selama 2 (dua) tahun

Tabel-58. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Jenis Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2)- (3) Diisi dengan jenis produk hukum, contoh : Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. MoU, dll
- (4) Diisi dengan nomor dan tanggal peraturan yang tersebut
- (5) Diisi dengan perihal peraturan
- (6) Unggah dokumen

Tabel-59. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst.

(2) Cukup Jelas

(3) Diisi dengan peruntukan anggaran

(4) Diisi dengan jumlah anggaran tahun sebelumnya, contoh : jika Dokumen Informasi Kinerja

(5) Diisi dengan jumlah anggaran tahun berjalan, sesuai tahun disusunnya Dokumen Informasi Kinerja

Tabel-60. Pendapatan Asli Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	
2	Retribusi	
3	Laba BUMD	
4	Pendapatan lainnya yang Sah	
	Total	

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst

(2)-(3) Cukup Jelas

Tabel-61. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Sumber :

Keterangan:

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama lokasi yang melakukan inovasi pengelolaan lingkungan hidup daerah
- (3) Diisi dengan nama inovasi yang dilakukan
- (4) Diisi dengan dieskripsi masing-masing inovasi
- (5) Diisi dengan dasar hukum melakukan inovasi